

## Evaluasi Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Kantor Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Dompu)

Ayunita<sup>1✉</sup>, Ega Saiful Subhan<sup>2</sup>, Ibrahim Zakaria<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu-Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntansi lingkungan telah diterapkan, serta mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam proses implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap analis keuangan, kepala dinas, dan staf terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan belum diterapkan secara optimal karena tidak adanya akun khusus dalam pelaporan keuangan, rendahnya literasi pegawai terhadap akuntansi lingkungan, serta belum adanya kebijakan teknis atau regulasi daerah yang mengatur hal tersebut. Temuan ini mengindikasikan perlunya pembenahan pada aspek regulasi, pelatihan SDM, serta sistem pelaporan keuangan daerah agar mendukung prinsip transparansi dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** Akuntansi lingkungan, Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

### Abstract

*This study aims to evaluate the implementation of environmental accounting in the financial reporting of the local government at the Agriculture and Plantation Office of Dompu Regency. The focus of the study is to determine the extent to which environmental accounting has been applied and to identify the main obstacles faced during its implementation. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews with financial analysts, the head of the department, and relevant staff. The results indicate that environmental accounting has not been optimally implemented due to the absence of specific accounts in financial reports, low staff literacy regarding environmental accounting, and the lack of technical guidelines or local regulations. These findings suggest the need for improvements in regulatory frameworks, human resource training, and local financial reporting systems to support transparency and environmental sustainability.*

**Keywords:** Environmental Accounting, Financial Reporting, Local Government.

Copyright (c) 2025 Ayunita

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [ayunitaa21@gmail.com](mailto:ayunitaa21@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Di tengah upaya pembangunan yang berkelanjutan, pengintegrasian akuntansi lingkungan ke dalam laporan keuangan pemerintah menjadi hal yang semakin penting, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertanian. Akuntansi lingkungan berperan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan, sehingga dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Putri dan Lestari dalam (Zuherman, 2025)), akuntansi lingkungan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena menyediakan mekanisme pencatatan dan pelaporan atas dampak lingkungan dari kegiatan entitas. Menurut (Nursamsiah et al., 2019). akuntansi

lingkungan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasionalnya. Dalam sektor pertanian, akuntansi lingkungan berpotensi membantu pemerintah dalam mengkalkulasi nilai ekonomi dari sumber daya alam yang selama ini belum tercermin dalam praktik akuntansi tradisional. Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah pendekatan biaya pengganti (*replacement cost*), yaitu memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan atau mengganti sumber daya yang mengalami kerusakan atau kelangkaan. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan tidak hanya berperan sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam strategi keberlanjutan yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan konservasi lingkungan (Chairia et al., 2022). Dalam lingkup kantor pertanian sebagai bagian dari instansi pemerintah, penerapan valuasi akuntansi lingkungan memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi riil sumber daya alam yang dimanfaatkan. Melalui integrasi akuntansi lingkungan, informasi keuangan yang disajikan dapat menggambarkan dampak ekologis dari kegiatan pertanian, seperti konsumsi air, kerusakan lahan, emisi gas rumah kaca, serta limbah hasil produksi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan tanggung jawab lembaga publik, tetapi juga membantu pemerintah dalam merancang anggaran yang lebih efektif untuk mendukung kegiatan konservasi dan pertanian berwawasan lingkungan. Dengan memasukkan aspek lingkungan ke dalam pelaporan keuangan, para pengambil kebijakan dapat memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan secara lebih komprehensif, sehingga keputusan pembangunan dapat difokuskan pada prinsip keberlanjutan yang berbasis bukti. Seperti yang dijelaskan oleh (Lestari, 2019), penerapan akuntansi lingkungan mendukung proses pelaporan biaya lingkungan secara menyeluruh dan memperlihatkan komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan.

Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi lingkungan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengumpulan data. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, perusahaan dapat lebih mudah menganalisis dan melaporkan biaya-biaya lingkungan dengan akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap tantangan lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, sangat penting dalam proses ini, karena membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait pengelolaan limbah serta dampak lingkungan lainnya (Wahyuni et al., 2024). Implementasi akuntansi lingkungan juga tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan ekologis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, seperti penghematan biaya, peningkatan reputasi, dan membuka peluang untuk keberlanjutan jangka panjang. Menurut (Hidayat & Sisdiyanto, 2025), integrasi teknologi informasi dalam akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengelola data lingkungan dengan lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang maju dapat membantu perusahaan untuk memenuhi standar pelaporan lingkungan yang semakin ketat dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Penerapan akuntansi lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. (Musa, 2024), menyoroti kurangnya laporan biaya lingkungan yang terstruktur serta komunikasi yang belum optimal dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, (Wahyuni et al., 2024), menemukan bahwa meskipun biaya lingkungan telah dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama (pencegahan, pendeteksian, dan kegagalan), pencatatan dan penyajiannya masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pemahaman manajemen serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi internal dan pedoman teknis di tingkat daerah, seperti mengacu pada PSAK 69, guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian (Yusa et al., 2024). Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang dikenal dengan potensi sektor pertaniannya yang cukup dominan, terutama dalam produksi jagung, padi, dan tanaman hortikultura. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu memiliki peran penting dalam mengelola serta mengawasi kegiatan pertanian di wilayah tersebut. Selain sebagai pelaksana kebijakan teknis di bidang pertanian, dinas ini juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kegiatan pertanian dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan menjadi hal yang relevan untuk ditinjau, terutama dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan yang mencerminkan tanggung jawab ekologis dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, terlihat bahwa penerapan akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan pemerintah masih belum berjalan dengan maksimal. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah sebagian pegawai mengaku belum familiar dengan konsep akuntansi lingkungan dan bagaimana cara mengevaluasinya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diperparah dengan belum adanya panduan teknis di tingkat daerah yang bisa dijadikan acuan dalam menerapkan dan mengevaluasi akuntansi lingkungan di sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk mulai memperhatikan integrasi aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan, terutama di sektor yang erat kaitannya dengan alam seperti pertanian.

Selain masalah tersebut terdapat perbedaan temuan dari para peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2024), mengungkapkan bahwa PTPN VI telah melaksanakan praktik akuntansi lingkungan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 1 Tahun 2013. Perusahaan tersebut telah melakukan pengakuan dan pengukuran biaya pengelolaan limbah secara tepat dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal klasifikasi, karena biaya lingkungan masih tercampur dengan biaya pengolahan lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk memisahkan pencatatan biaya lingkungan melalui akun tersendiri. Di sisi lain, studi oleh (Nuryana et al., 2018), menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang diteliti telah berhasil menerapkan konsep green accounting dalam pelaporan keuangan. Tingkat pemahaman pegawai terhadap akuntansi lingkungan cukup baik, dan laporan keuangan telah melalui proses audit oleh BPKP serta akuntan publik. Sementara itu, (Hidayat & Sisdiyanto, 2025), menemukan bahwa meskipun suatu perusahaan telah mulai menerapkan akuntansi lingkungan, masih ada sejumlah kelemahan, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dampak lingkungan. Hambatan utama dalam implementasi tersebut adalah minimnya pemahaman dari pihak manajemen dan staf, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, (Martadi, 2018), dalam penelitiannya menyoroti bahwa banyak instansi pemerintah mengalami kesulitan dalam mengadopsi akuntansi agrikultur berdasarkan standar IPSAS 27. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain tidak tersedianya pasar aktif untuk aset biologis, kurangnya pedoman teknis yang memadai, serta perbedaan dalam penafsiran aset biologis antar lembaga pemerintah.

Berdasarkan masalah dilapangan dan perbedaan temuan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan akuntansi lingkungan pada pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam sektor Pertanian". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi lingkungan pada pelaporan keuangan pemerintah di sektor pertanian, khususnya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Fokus utama penelitian mencakup identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Evaluasi

Evaluasi adalah bagian dari sistem manajemen berupa perencanaan perorganisasian, pelaksanaan observasi dan evaluasi. Dengan tidak mengadakan evaluasi, keadaan sebuah objek tidak diketahui dalam melakukan rancangannya, dalam pelaksanaannya, dan hasilnya. Kata evaluasi telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia kata yang dimaksud adalah kata yang serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang didefinisikan sebagai penilaian atau penafsiran (Widoyoko, 2017)

Terdapat beberapa definisi mengenai evaluasi menurut para ahli:

1. Evaluasi adalah sebuah perencanaan kegiatan yang terancang untuk menemukan keadaan objek dengan menggunakan instrumen, di mana hasilnya nanti dibandingkan dengan tolak ukur untuk menemukan Kesimpulan (Arikunto & Jabar, 2018).
2. Evaluasi adalah the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives, dimana evaluasi didefinisikan sebagai proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan sebuah Keputusan (Stufflebeam dalam pengambilan sebuah Keputusan. (Mulyasa, 2015).

### Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan implementasi menjadi krusial karena menjadi penentu keberhasilan realisasi suatu kebijakan atau program.

Menurut Subarsono (2015), implementasi adalah tahapan kebijakan publik yang berorientasi pada bagaimana keputusan yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata dan berdampak pada masyarakat.

Beberapa definisi implementasi menurut para ahli terbaru:

1. Winarno (2016) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses kegiatan untuk menerapkan dan merealisasikan kebijakan atau program ke dalam bentuk tindakan yang dapat dilihat dan dirasakan dampaknya.
2. Agustino (2019) menjelaskan bahwa implementasi adalah mekanisme pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga pelaksana dengan melibatkan sumber daya dan koordinasi antar aktor terkait agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.
3. Tachjan (2017) menyebutkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan teknis, melainkan bagian dari proses politik dan administratif yang melibatkan interpretasi, adaptasi, dan partisipasi berbagai pihak.

### Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan adalah cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan Keputusan organisasi, baik dalam sektor bisnis, pemerintah maupun lembaga nirlaba. Dalam konteks global yang semakin menekankan keberlanjutan, akuntansi lingkungan menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab (Zulfa et al., 2023)

Prinsip dasar akuntansi lingkungan melibatkan pengakuan bahwa sumber daya alam, seperti udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati, memiliki nilai yang harus dihargai dan dipertimbangkan dalam pengelolaan organisasi. Akuntansi lingkungan menyediakan metode untuk mengukur dampak aktivitas operasional terhadap elemen-elemen ini, termasuk emisi karbon, limbah industri, dan penggunaan energi. Hasil pengukuran ini

kemudian di terjemahkan kedalam laporan keuangan atau laporan keberlanjutan, yang sering terjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial Perusahaan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Kemudian menurut Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

### **Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu masukan dalam kegiatan produksi, terutama disektor pertanian, industri, dan jasa. Semua kegiatan dalam proses ini menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentu saja SDA harus di manfaatkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin banyak SDA yang di butuhkan, karena menyangkut dengan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Kondisi ini akan tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapital. Bagi negara yang sedang berkembang, ketergantungan terhadap sumber daya manusia sangatlah tinggi, begitu juga negara Indonesia, pemanfaatan SDA masih merupakan sumber penghasilan utama pendapatan nasional.

Dampak dari penggunaan dan ketergantungan terhadap SDA memberikan indicator mulai langkah nya SDA. Kualitas sumber daya manusia yang rendah belum mampu mengolah SDA dengan teknologi yang tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan SDA diolah secara manual dan rendah nya tingkat efisiensi penggunaan. SDA tersebut akan banyak dimanfaatkan tapi dengan tingkat efisiensi yang rendah. Hal tersebut menimbulkan limbah dan pemanfaatan SDA sangatlah tinggi. Apabila pemanfaatan teknologi mampu mengelola SDA dengan baik, maka tingkat efisiensi penggunaan dan pemanfaatan akan tinggi juga. dari sisi lain semakin banyak barang dan jasa yang di hasilkan guna memenuhi kebutuhan manusia semakin banyak pula pencemaran lingkungan (polusi). Pencemaran ini memberikan dampak negative terhadap kesehatan manusia, yang pada hakekatnya akan menekan tingkat kesejahteraan hidup manusia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggali secara mendalam evaluasi implementasi akuntansi lingkungan pada pelaporan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dompu. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana akuntansi lingkungan diterapkan secara efektif dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi menurut Sugiyono (2019), yang meliputi triangulasi sumber, teknik, data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai berbagai pihak, seperti pejabat dinas, staf pelaksana, dan pihak terkait lainnya. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan teknik ini, data yang diperoleh menjadi lebih kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data primer dari penelitian ini di peroleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi dengan kepala dinas pertanian, wakil kepala dinas atau pegawai yang mengetahui penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan dan kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengimplementasikan akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan di sektor pertanian dan Perkebunan kabupaten dompu. Data sekunder berasal dari dokumen pendukung seperti laporan resmi, data statistic, regulasi, artikel ilmiah, dan sumber daring relevan mengenai evaluasi implementasi akuntansi lingkungan pada laporan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kedua data ini memberikan Gambaran menyeluruh tentang evaluasi implementasi akuntansi lingkungan pada pelaporan keuangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari subjek dan informan yang di pilih secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2017). Moleong (2017) menyatakan bahwa subjek penelitian dalam studi kualitatif disebut sebagai narasumber atau informan, yakni mereka yang mengetahui secara mendalam masalah yang sedang diteliti, karena memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dalam konteks penelitian. Subjek penelitian ini adalah instansi pemerintah dinas pertanian dan Perkebunan kabupaten dompu. Informan mencakup pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam terkait kebijakan dan pelaksanaan program seperti kepala dinas, wakil kepala dinas atau pegawai terkait, teknik snow ballsampling juga di digunakan untuk memperluas cakupan data, kombinasi dari data subjek dan informasi ini memberika, tentang strategi, eektivitas dan tantangan keterbatasan sumber daya, serta kurang nya pemahaman.

Adapun metode pengumpulan data yang saling melengkapi digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. **Observasi**

Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala yang tampak di lapangan menggunakan pancaindra tanpa bantuan alat ukur standar lainnya. Menurut Sugiyono (2019), observasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data kontekstual dari kondisi alamiah objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada pengelolaan sumber daya alam di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Observasi ini dirancang secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait praktik, hambatan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan.

### 2. **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dan yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) agar peneliti dapat memperoleh data yang jelas, lengkap, dan akurat terkait persepsi, pemahaman, serta pelaksanaan akuntansi lingkungan dalam kegiatan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### 3. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, gambar, rekaman, atau benda fisik lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data dokumenter dikumpulkan dari dokumen program, laporan kegiatan, laporan keuangan, foto, dan informasi lain yang relevan dengan implementasi akuntansi lingkungan di sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Dompu. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tertulis yang memperkuat temuan lapangan dan hasil analisis.

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan humberman (2020) yang terdiri dari tiga tahap yaitu;

1. Reduksi data  
Data tersebut diperoleh dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan secara rinci.mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sehingga dengan demikian data yang telah direduksi pasti akan memberikan Gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data atau selanjutnya, mencari lagi bila diperlukan. Reduksi data bisa di bantu dengan alat elektronik seperti: computer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu sehingga dapat merangkum, mengambil data yang lebih penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar dan kecil dan angka-angka atau data yang tidak penting dibuang.
2. Penyajian data,  
Sesudah mereduksi data, selanjutnya melakukan penyajian data untuk mempermudah memahami data yang di peroleh.pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian, teks yang bersifat negative.
3. Penarikan Kesimpulan  
Tahap ketiga yaitu penarikan simpulan. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebenarnya belum ada. Baik berupa deskripsi atau Gambaran suatu objek yang sebelumnya masih di gunakan sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Penarikan simpulan dihasilkan dalam bentuk teks yang naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Implementasi Akuntansi Lingkungan pada Pelaporan Keuangan Pemerintah

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi akuntansi lingkungan telah dilaksanakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa akuntansi lingkungan belum diterapkan secara optimal dan terstruktur dalam sistem pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian (10 s.d 15 Juli 2025):

Ibu Aida Supriati, Analis Keuangan yang telah bekerja selama 16 tahun di dinas tersebut, menyampaikan bahwa hingga saat ini, belum ada akun khusus dalam sistem pelaporan untuk mengakomodasi biaya lingkungan. Aktivitas seperti pengelolaan limbah pertanian, penggunaan pestisida, dan pelatihan petani ramah lingkungan masih dicatat dalam kelompok belanja umum.

*"Selama ini memang belum ada akun khusus biaya lingkungan. Biasanya kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, tetap kami masukkan dalam kelompok belanja biasa, tidak dibedakan secara spesifik." (Wawancara dengan Ibu Aida Supriati, 15 Juli 2025)*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informasi dari Staf Keuangan lainnya, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan sistem pencatatan dan belum adanya format khusus membuat pencatatan biaya lingkungan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas operasional lainnya.

*"Sistem pelaporan keuangan yang kami gunakan belum punya fitur atau kode akun untuk biaya lingkungan. Jadi ya semua dicatat sebagai belanja barang atau pemeliharaan. Kami pun tidak diberikan pedoman atau pelatihan khusus tentang akuntansi lingkungan. Selama ini kami menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menyusun laporan keuangan, tapi sistem itu belum memfasilitasi pencatatan secara khusus terkait pengeluaran yang bersifat lingkungan. Jadi kalau misalnya ada pembelian pupuk organik, alat pengolahan limbah, atau kegiatan penghijauan, itu tetap masuknya ke akun umum seperti belanja operasional atau pemeliharaan aset." (Wawancara dengan Staf Keuangan, 15 Juli 2025)*

Dari sisi kepemimpinan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bapak Saharul, mengakui bahwa perhatian terhadap isu lingkungan sudah mulai tumbuh, namun belum secara teknis dimasukkan dalam sistem pelaporan keuangan dinas.

*“Kami sangat sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dalam kegiatan pertanian. Tapi memang sampai hari ini, belum ada aturan teknis dari pemerintah daerah yang mengarahkan kami bagaimana mencatat atau melaporkan biaya lingkungan secara terpisah.” (Wawancara dengan Kepala Dinas, 15 Juli 2025)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan belum diterapkan secara optimal di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Tidak terdapat akun khusus untuk mencatat biaya lingkungan; semua pengeluaran seperti pembelian pupuk organik, penanganan limbah, dan penghijauan masih digabung dalam belanja umum. Sistem pelaporan yang digunakan, yaitu SIKD, belum mendukung pencatatan biaya lingkungan secara terpisah. Selain itu, pegawai belum pernah mendapat pelatihan atau pedoman teknis tentang akuntansi lingkungan. Meski pimpinan menyadari pentingnya pelestarian lingkungan, belum ada regulasi daerah yang mengatur penerapannya secara khusus.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Lestari dan Pamungkas (2020) yang menyebutkan bahwa akuntansi lingkungan di daerah masih rendah karena belum ada regulasi, tenaga ahli, dan sistem yang terintegrasi. Handayani (2018) juga menegaskan bahwa belum adanya standar pelaporan dan pelatihan teknis menjadi hambatan utama.

Secara teori, hal ini diperkuat oleh Burritt dan Schaltegger (2014) yang menyatakan bahwa akuntansi lingkungan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Dalam sektor publik, hal ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, menurut teori kelembagaan modern (Maggio & Powell, 2015), adopsi sistem baru seperti akuntansi lingkungan dipengaruhi oleh tekanan dari regulasi, norma, dan contoh dari lembaga lain.

Kesimpulannya, belum optimalnya penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Pertanian dan Perkebunan disebabkan oleh minimnya regulasi, kurangnya pelatihan dan SDM, serta belum adanya dorongan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan daerah yang lebih jelas dan peningkatan kapasitas pegawai agar pelaporan keuangan pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

### **Kendala Implementasi Akuntansi Lingkungan**

Penelitian ini juga menemukan tiga kelompok kendala utama dalam penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, yaitu keterbatasan SDM, rendahnya literasi, dan belum adanya kebijakan teknis lokal.

#### **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kendala pertama yang menghambat penerapan akuntansi lingkungan adalah terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang benar-benar memahami dan dapat menjalankan pencatatan biaya lingkungan secara teknis. Di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, tenaga teknis keuangan yang memiliki spesialisasi atau pelatihan tentang akuntansi lingkungan masih belum tersedia.

*“Kalau untuk tenaga khusus yang menangani pelaporan biaya lingkungan itu belum ada. Semuanya masih ditangani pegawai biasa di bagian keuangan.” (Wawancara dengan Ibu Aida Supriati, Analis Keuangan, 15 Juli 2025)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Nurlaela, staf teknis bagian pertanian yang sering terlibat dalam program ramah lingkungan, namun belum pernah dilibatkan dalam diskusi pencatatan atau pelaporan berbasis lingkungan.

*“Kami yang di lapangan hanya melaksanakan program, tapi tidak pernah diminta untuk input data soal pengaruh kegiatan itu terhadap lingkungan. SDM-nya memang belum terbagi secara fungsional.” (Wawancara dengan Nurlaela, 15 Juli 2025)*

Kurangnya personel khusus di bidang ini menjadikan pelaksanaan akuntansi lingkungan sulit untuk dijalankan secara teknis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

maupun pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Suryani dan Lestari (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya implementasi akuntansi lingkungan di instansi pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan tenaga ahli dan minimnya pemahaman teknis dari sumber daya manusia yang terlibat. Hal senada juga disampaikan oleh Putri dan Handayani (2022), yang menegaskan bahwa sebagian besar instansi pemerintah belum memiliki unit atau petugas khusus yang menangani pelaporan dan pencatatan terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM dan pengadaan personel khusus menjadi langkah penting dalam mendorong efektivitas implementasi akuntansi lingkungan di instansi pemerintah.

Hal ini selaras dengan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1993), yang menekankan bahwa kualitas SDM, berupa pengetahuan dan keterampilan, merupakan aset penting dalam mendukung efektivitas organisasi. Selain itu, teori manajemen SDM menurut Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kecocokan antara kemampuan individu dengan tugas yang diemban, termasuk dalam pengelolaan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM dan pengadaan personel khusus menjadi langkah penting dalam mendorong efektivitas implementasi akuntansi lingkungan di instansi pemerintah.

### **Rendahnya Literasi Akuntansi Lingkungan**

Selain keterbatasan jumlah personel, kendala berikutnya adalah minimnya pemahaman pegawai mengenai prinsip, ruang lingkup, dan cara pelaporan akuntansi lingkungan. Literasi yang rendah membuat sebagian besar kegiatan lingkungan yang seharusnya dicatat sebagai biaya lingkungan tetap diklasifikasikan sebagai belanja umum.

*"Saya sendiri belum pernah ikut pelatihan yang membahas akuntansi lingkungan secara khusus. Kalau pelatihan keuangan, ya umum saja. Jadi kami juga tidak tahu bahwa pelatihan petani atau pengelolaan limbah bisa dicatat sebagai biaya lingkungan." (Wawancara dengan Ibu Aida Supriati, 10 Juli 2025)*

Hal ini diperkuat oleh Bapak Ahmad, staf perencanaan, yang menyatakan bahwa selama ini mereka hanya fokus pada penyusunan anggaran dan laporan berdasarkan template lama, tanpa pernah diberikan pembekalan tentang bagaimana mengklasifikasikan aktivitas berbasis lingkungan.

*"Tidak ada materi atau sosialisasi yang menyampaikan bahwa kegiatan lingkungan harus dicatat secara berbeda. Kita tahunya semua masuk saja ke belanja kegiatan biasa." (Wawancara dengan Ahmad, 13 Juli 2025)*

Akibat rendahnya literasi, banyak kegiatan dengan dampak lingkungan positif tidak teridentifikasi atau tidak terdokumentasi sebagai bagian dari akuntansi lingkungan, padahal seharusnya bisa digunakan untuk evaluasi kinerja dinas dan transparansi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Handayani (2022) bahwa ketidaktahuan akan standar dan indikator pelaporan lingkungan menyebabkan sejumlah capaian tidak masuk dalam laporan keuangan berbasis lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi lingkungan menjadi kebutuhan mendesak agar setiap kegiatan positif yang dilakukan instansi tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga terukur dan dilaporkan secara akuntabel. Menurut Herawati dan Putri (2018), literasi akuntansi lingkungan yang baik memungkinkan aparatur untuk lebih sensitif terhadap isu keberlanjutan dan mampu mengintegrasikan informasi lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan secara sistematis dan transparan. Hal ini sejalan dengan teori literasi menurut Nutbeam (2000) membagi literasi menjadi tiga tingkatan: fungsional, interaktif, dan kritis. Dalam konteks ini, peningkatan literasi akuntansi lingkungan perlu mendorong aparatur mencapai tingkat literasi kritis, yakni kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi akuntansi lingkungan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis dan akuntabel.

### Belum Adanya Kebijakan Teknis Lokal

Kendala terakhir dan paling mendasar adalah ketiadaan regulasi teknis atau kebijakan daerah yang mengatur atau mewajibkan penerapan akuntansi lingkungan di lingkup pemerintahan daerah. Tanpa adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran (SE), atau Petunjuk Teknis (Juknis), maka proses pencatatan biaya lingkungan tidak bisa dijalankan secara formal.

*“Kalau tidak ada regulasi sebagai dasar, kami sulit untuk menerapkan akuntansi lingkungan. Karena kan di instansi pemerintah semua harus berdasarkan aturan. Kami butuh petunjuk teknis dari pemerintah daerah agar bisa mengarahkan tim keuangan untuk mencatat biaya lingkungan secara terstandar.” (Wawancara dengan Bapak Saharul, Kepala Dinas, 10 Juli 2025)*

Pendapat serupa diungkapkan oleh Bapak Rasyid, Koordinator Penyuluh Kecamatan Woja, yang menyebutkan bahwa meskipun banyak kegiatan di lapangan yang mendukung pelestarian lingkungan, namun tidak bisa diakui sebagai bagian dari pelaporan karena tidak ada aturan formal yang membingkai hal tersebut.

*“Banyak kegiatan kita yang sebetulnya mendukung kelestarian, seperti pertanian organik atau konservasi tanah. Tapi karena tidak ada dasar hukum, ya akhirnya hanya dianggap kegiatan biasa di laporan keuangan.” (Wawancara dengan Rasyid, 10 Juli 2025)*

Tanpa dasar regulasi, segala bentuk pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan akan dianggap tidak sah secara administratif, dan hal ini tentu menjadi hambatan terbesar dalam membangun sistem akuntansi lingkungan di tingkat dinas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang mengerti akuntansi lingkungan, rendahnya pemahaman pegawai tentang cara pencatatan biaya lingkungan, dan belum adanya aturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut. Pegawai di bagian keuangan belum memiliki keahlian khusus, dan sebagian besar belum pernah mendapat pelatihan tentang akuntansi lingkungan. Akibatnya, kegiatan yang seharusnya bisa dicatat sebagai bagian dari biaya lingkungan seperti pelatihan pertanian organik atau pengelolaan limbah—masih dimasukkan dalam belanja umum. Selain itu, karena belum ada peraturan daerah atau petunjuk teknis, pencatatan biaya lingkungan belum bisa dilakukan secara resmi.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian Handayani (2018) dan Lestari & Pamungkas (2020) yang menyebutkan bahwa keterbatasan SDM dan belum adanya aturan yang jelas menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi lingkungan di instansi pemerintah. Dari sisi teori, Burritt dan Schaltegger (2014) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan membutuhkan dukungan dari sistem, organisasi, dan pegawai yang kompeten. Selain itu, teori kelembagaan dari DiMaggio dan Powell (2015) menyebutkan bahwa suatu inovasi baru seperti akuntansi lingkungan dapat berjalan jika ada dorongan dari aturan atau kebijakan. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan akuntansi lingkungan secara efektif, Dinas membutuhkan pelatihan, penambahan SDM yang kompeten, serta adanya kebijakan atau regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaannya. Selain itu, rendahnya literasi akuntansi lingkungan juga menjadi kendala yang signifikan. Menurut Nutbeam (2000), literasi mencakup kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan. Ketika literasi aparatur terhadap isu-isu lingkungan dan akuntansi masih rendah, maka pemahaman mereka terhadap pentingnya pelaporan lingkungan pun terbatas, yang berdampak pada kurang optimalnya implementasi akuntansi lingkungan di sektor publik. Teori regulasi menurut Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) menekankan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada tiga elemen utama: kejelasan aturan, kapasitas penegakan, dan legitimasi otoritas. Tanpa regulasi yang jelas dan dapat diterapkan, upaya inovasi seperti akuntansi lingkungan akan sulit berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di institusi pemerintahan.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Akuntansi Lingkungan dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penelitian ini mengungkap bahwa akuntansi lingkungan belum terimplementasi secara optimal dalam pelaporan keuangan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Seluruh biaya atau aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti pengelolaan limbah pertanian, pelatihan petani tentang pertanian ramah lingkungan, penggunaan pestisida, dan konservasi tanah masih dimasukkan ke dalam pos belanja umum seperti belanja barang atau pemeliharaan. Tidak terdapat klasifikasi atau pengkodean akun khusus yang secara spesifik ditujukan untuk mencatat biaya lingkungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan biaya lingkungan masih bersifat implisit dan belum menjadi bagian yang terpisah dari sistem pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan rendahnya integrasi aspek keberlanjutan (sustainability) dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Padahal menurut Gray, Owen, dan Adams (1996), akuntansi lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial organisasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi.

Pernyataan dari Ibu Aida Supriati dan staf keuangan menunjukkan bahwa belum adanya sistem pelaporan yang secara teknis memungkinkan pencatatan biaya lingkungan merupakan akar permasalahan. Kondisi ini juga diperparah oleh belum tersedianya pelatihan dan pedoman teknis khusus dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Kepala Dinas pun mengakui bahwa meskipun kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan telah tumbuh, belum ada petunjuk teknis atau regulasi yang dapat menjadi acuan resmi dalam mengimplementasikan akuntansi lingkungan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2006) dan Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa hambatan utama implementasi akuntansi lingkungan di sektor publik adalah tidak adanya dukungan sistem informasi, ketiadaan regulasi, dan rendahnya kapasitas SDM. Tanpa adanya sistem pendukung dan kerangka regulasi yang jelas, maka institusi publik akan mengalami kesulitan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip akuntansi lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka. Hal ini diperkuat oleh teori Human Capital (Becker, 1993), yang menyatakan bahwa kualitas SDM sangat menentukan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Jika individu dalam organisasi tidak memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai tentang akuntansi lingkungan, maka implementasi sistem pelaporan yang ramah lingkungan akan sulit tercapai secara optimal.

### **Kendala Implementasi Akuntansi Lingkungan**

Berdasarkan analisis data lapangan, terdapat tiga kelompok besar kendala yang menghambat penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, yaitu keterbatasan SDM, rendahnya literasi akuntansi lingkungan, dan belum adanya kebijakan teknis lokal.

#### **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kendala pertama adalah kurangnya personel yang memiliki keahlian atau latar belakang di bidang akuntansi lingkungan. Pekerjaan pencatatan keuangan masih ditangani oleh pegawai yang bekerja berdasarkan sistem umum yang telah ada, tanpa spesialisasi terhadap aspek lingkungan.

Wawancara dengan Ibu Aida Supriati dan Ibu Nurlaela menunjukkan bahwa belum ada tenaga khusus yang ditugaskan atau diberdayakan untuk menangani isu lingkungan secara terpisah dalam laporan keuangan. Pegawai fungsional di bidang pertanian yang sebenarnya terlibat langsung dalam aktivitas pelestarian lingkungan pun tidak dilibatkan dalam proses pelaporan. Ini menunjukkan belum terintegrasinya kerja teknis di lapangan dengan sistem pencatatan administratif dan keuangan.

Menurut Suaryana (2010) dan Mahsun (2006), kompetensi dan kapasitas SDM sangat menentukan efektivitas implementasi sistem akuntansi di sektor publik. Tanpa adanya personel yang memahami baik sisi teknis pertanian maupun prinsip pelaporan keuangan lingkungan, maka sistem akuntansi lingkungan sulit diwujudkan.

Dalam konteks saat ini, pendapat tersebut tetap relevan. Penelitian oleh Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kualitas SDM, khususnya yang terkait dengan kompetensi teknis, akuntansi, dan pemahaman terhadap regulasi, merupakan faktor utama keberhasilan reformasi akuntansi sektor publik, termasuk penerapan akuntansi lingkungan.

Hal senada juga disampaikan oleh Yusuf dan Anggraini (2020) yang menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya integrasi informasi lingkungan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Mereka menekankan perlunya pelatihan teknis, pendampingan, dan peningkatan literasi akuntansi hijau bagi pegawai pemerintahan, khususnya di sektor pengelolaan sumber daya alam.

### **Rendahnya Literasi Akuntansi Lingkungan**

Kendala kedua yang sangat krusial adalah masih rendahnya pemahaman pegawai terhadap konsep dan ruang lingkup akuntansi lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai belum pernah menerima pelatihan atau sosialisasi terkait akuntansi lingkungan. Hal ini menyebabkan kegiatan yang seharusnya dicatat sebagai biaya lingkungan tetap masuk dalam klasifikasi umum seperti belanja operasional atau pemeliharaan.

Seerti diungkap oleh Ibu Aida dan Bapak Ahmad, tidak adanya materi pelatihan atau sosialisasi teknis membuat pegawai tidak mengetahui bahwa kegiatan seperti pelatihan petani, konservasi lahan, atau pengelolaan limbah bisa dicatat sebagai biaya lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya dokumentasi dan evaluasi terhadap kontribusi kegiatan dinas terhadap aspek keberlanjutan lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi (2020) yang menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman pegawai pemerintah terhadap akuntansi lingkungan menyebabkan rendahnya pencatatan dan pelaporan yang berbasis dampak lingkungan. Selain itu, menurut Susilowati (2018), peningkatan kapasitas dan literasi keuangan lingkungan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam reformasi sistem pelaporan keuangan yang lebih berorientasi lingkungan di tingkat daerah.

### **Belum Adanya Kebijakan Teknis Lokal**

Kendala ketiga yang menjadi faktor penghambat utama adalah belum tersedianya dasar hukum atau kebijakan teknis dari pemerintah daerah yang mengatur penerapan akuntansi lingkungan. Peraturan daerah (Perda), surat edaran (SE), atau petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur klasifikasi dan sistematika pelaporan biaya lingkungan hingga kini belum tersedia.

Pernyataan dari Kepala Dinas dan Koordinator Penyuluh Kecamatan Woja menunjukkan bahwa meskipun kegiatan-kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan telah dilakukan, namun karena tidak ada aturan formal yang membingkai pencatatannya, maka kegiatan tersebut tidak dapat diakui atau dicatat secara administratif sebagai bagian dari biaya lingkungan.

Menurut Wahyuni (2017) dan Kurniawan (2021), regulasi atau kebijakan daerah menjadi faktor paling menentukan dalam implementasi akuntansi lingkungan. Tanpa adanya kebijakan teknis, maka pelaporan biaya lingkungan akan bersifat informal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Hal ini juga dikaitkan dengan teori sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2006) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem akuntansi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh prosedur dan aturan yang jelas sebagai acuan sistem kerja. Dalam konteks ini, absennya aturan teknis menjadikan sistem pelaporan lingkungan tidak berjalan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi lingkungan pada pelaporan keuangan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu belum berjalan secara optimal dan terstruktur. Ketidadaan akun khusus untuk pencatatan biaya lingkungan menyebabkan berbagai kegiatan seperti pengelolaan limbah, pelatihan ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan masih tercatat dalam kelompok belanja umum, sehingga kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan tidak terlihat secara eksplisit. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga kendala utama dalam implementasi akuntansi lingkungan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia karena tidak adanya tenaga atau unit khusus yang menangani pelaporan biaya lingkungan, rendahnya literasi akuntansi lingkungan akibat minimnya pelatihan, serta belum adanya kebijakan teknis atau regulasi lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum formal pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti menyarankan perlunya penerbitan regulasi teknis yang jelas, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan sistem pelaporan keuangan yang ramah lingkungan dengan klasifikasi akun khusus dalam aplikasi keuangan daerah, peningkatan koordinasi antara bidang teknis dan bagian keuangan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin agar akuntansi lingkungan benar-benar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan transparansi publik.

## Referensi:

- Anggraini, F. R. R. (2006). *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara
- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). *Accounting Information Systems* (10th ed.). Pearson Education.
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2014). *Accounting for sustainability: Practising accountability*. Routledge
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2014). *Accounting for sustainability: Practising accountability*. Routledge.
- Chairia, C., Br Ginting, J. V., Ramles, P., & Ginting, F. (2022). Implementasi Green Accounting (Akuntansi Lingkungan) Di Indonesia: Studi Literatur. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 40-49. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.368>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2015). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk (Eds.), *Classical sociological theory* (3rd ed., pp. 560-569). Wiley-Blackwell. (Asli diterbitkan 1983)
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). *An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Cost Management: Accounting and Control* (5th ed.). South-Western College Publishing.
- Hidayat, R., & Sisdianto, E. (2025). Implementasi Akuntansi Lingkungan Dalam Industri Pertanian : Studi Kasus Pada Pt Sugar Group Companies Di Lampung. *Jemba*, 2(1), 496-507. <https://doi.org//doi.org/10.61722/>
- Handayani, R. (2018). Tantangan implementasi akuntansi lingkungan di sektor publik: Studi pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 45-56.

- Herawati, N., & Putri, T. R. (2018). Literasi Akuntansi Lingkungan dalam Mendorong Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 45–56.
- Kurniawan, A. (2021). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 121–135.
- Lestari, D. A. (2019). Analisis Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Xiv Takalar. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8727Abstrak.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8727Abstrak.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Lestari, A., & Pamungkas, I. D. (2020). Implementasi akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 210–220.
- Martadi, I. F. (2018). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), s48–60. <https://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/788>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Musa, N. U. R. K. M. (2024). Urgensi kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan akuntansi lingkungan. *ESGSB*, 1(2), 0–21. [file:///C:/Users/ATUN/Downloads/musa 2024.pdf](file:///C:/Users/ATUN/Downloads/musa%2024.pdf)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nursamsiah, A. I., Lutfi, A., Apriani, F. E., & Prawira, I. F. adi. (2019). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 73–83. <https://doi.org/10.35138/organum.v2i2.57>
- Nuryana, I., Rachmadani, W. S., & Jati, K. W. (2018). Implementasi Green Accounting pada Daerah Rawan Bencana (Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 6(1), 11.sss <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v6i1.2182>
- Nurkencana, W., & Sunartana, P. (2016). *Evaluasi Hasil Belajar*. Usaha Nasional.
- Nurdin, M., & Usman, H. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Berkurikulum. CV Sinar Baru.
- Pratiwi, A. D. (2020). Tingkat Pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Akuntansi Lingkungan pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 45–59.
- Ramadhani, A. S., Hasugian, H., & Nasution, Y. S. J. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Giting. *Jurnal Proaksi*, 11(2), 351–365. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i2.5594>
- Winarti, A. (2007). Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suaryana, I. G. N. A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Susilowati, D. (2018). Akuntansi Lingkungan: Konsep dan Aplikasinya di Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 55–63.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J.(2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Suryani, T., & Lestari, D. P. (2021). Analisis implementasi akuntansi lingkungan di instansi pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 13(3), 189–201.
- Tachjan. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyuni, S. S., Meilani, F. A., Putri, N. A., & Nasirwan, N. (2024). Praktik Akuntansi Sederhana terhadap Sektor Agrikultur Pertanian Tanaman Padi. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 6(1), 45–53. <https://doi.org/10.28932/jafta.v6i1.8643>
- Wahyuni, S. (2017). *Kendala Implementasi Akuntansi Lingkungan di Pemerintah Daerah: Studi*
- Evaluasi Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah.....**

- Kasus Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 97-108.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Widoyoko, E. P. (2017). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Yusa, A., Albar, & Rakhmawati, I. (2024). Implementasi Akuntansi Agrikultur , Biologis Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Berbasis Maqashid Syariah. *JASIKA*, 04(02), 104-112. <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika/article/view/5220/1948>
- Yunada, R. (2009). *Evaluasi Program: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M., & Anggraini, R. (2020). Pengaruh Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen Terhadap Implementasi Akuntansi Lingkungan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 17(2), 133-144.
- Zuherman, N. H. (2025). Peran Akuntansi Lingkungan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ): Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 433-443. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/652>
- Zulfa, N., Sari, R. P., & Wibowo, A. (2023). Akuntansi lingkungan dan keberlanjutan: integrasi informasi lingkungan dalam pengambilan keputusan organisasi. *jurnal Ekonomika press*.